



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PASER
UNIT KERJA : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMIR FAISOL
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 155083

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.156.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 241 m²/135 m² di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 384.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/37 m² di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 80.500.000
3. Tanah Seluas 435 m² di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m²/36 m² di KAB / KOTA LAMONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 181.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m²/50 m² di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **291.300.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 113.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AGYA/MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	284.600.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	323.295.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	12.000.000
Sub Total	Rp.	2.067.195.000
III. HUTANG	Rp.	251.420.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.815.775.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.